



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan pengaturan mengenai kode klasifikasi Arsip;
- b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah diperlukan penyesuaian kode klasifikasi Arsip;
- c. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan Arsip dinamis yang efektif dan efisien, perlu menyusun pedoman kode klasifikasi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali Arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, daerah, dan perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Klasifikasi adalah penggolongan Arsip berdasarkan masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali Arsip.
4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis melalui penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
6. Pencipta Arsip adalah Perangkat Daerah, Penyelenggara Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Perusahaan Swasta berskala Kabupaten dan Perorangan.
7. Indeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata tangkap yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali Arsip
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam Pengelolaan Arsip Dinamis.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
- a. mewujudkan sistem pengelolaan Arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan hingga penyusutan Arsip;
 - b. menunjang kelancaran penataan berkas sejak penomoran Arsip, pemberkasan, hingga penemuan kembali Arsip; dan
 - c. mewujudkan tertib Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
- a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif .
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (5) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 93), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

KODE KLASIFIKASI ARSIP

000	UMUM	
000.1	KERUMAHTANGGAAN DAN KETATAUSAHAAN	
000.1.1	Telekomunikasi	
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
	000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri	
	000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)	
000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)	
000.1.6	Penyediaan Konsumsi	
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas	
	000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	
	000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
	000.1.8.2	Penghijauan
	000.1.8.3	Perbaikan Gedung
	000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
	000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
	000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	
	000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
	000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan	
	000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
	000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	
000.2	PERLENGKAPAN	
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan	
	000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor	
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3	Distribusi	
	000.2.3.1	Barang habis pakai
	000.2.3.2	Barang milik daerah

000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)	
000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	
000.3 PENGADAAN		
000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	
000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	
000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)	
000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)	
000.4 PERPUSTAKAAN		
000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka	
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
000.4.3	Koleksi Pustaka	
	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar Menukar
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
	000.4.3.6	Terbitan Internal
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	
000.4.6	Layanan Perpustakaan	
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
000.4.7	Kerjasama Perpustakaan	
	000.4.7.1	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia

	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
000.4.10	Konservasi	
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
000.4.12	Transformasi Digital	
000.4.13	Kurasi Digital	
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	
000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	
000.5	KEARSIPAN	
000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip)
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)

000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)	
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	
000.5.6	Penyusutan Arsip	
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang- kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan,
		Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	
000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis	
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
	000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)

000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	
000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	
000.5.15	Pengawasan Kearsipan	
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi
000.6	PERSANDIAN	
000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.6.2	Pengamanan persandian	
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidental
	000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	

000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
	000.8.1.1	Pembentukan
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran
000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	
	000.8.2.1	Analisa Jabatan
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
000.8.3	Ketatalaksanaan	
	000.8.3.1	Proses Bisnis
	000.8.3.2	Standar Pelayanan
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
	000.8.3.4	Pelayanan Publik
000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	
000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	
000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	
	000.8.6.1	Budaya Kerja
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN		
000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	
000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)	
000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	
000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	
000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	000.9.6.1	Data
	000.9.6.2	Statistik
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	
000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	

100	PEMERINTAHAN		
100.1	OTONOMI DAERAH		
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
		100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
		100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
		100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
		100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
		100.1.4.5	Assosiasi Daerah
	100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
		100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
	100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	
100.2	PEMERINTAHAN UMUM		
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama	
		100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
		100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
		100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
		100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
		100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
		100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM		
	100.3.1	Program Legislasi	
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2	Program Legislasi

	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
		100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
		100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
		100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
		100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
		100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
		100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
		100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
		100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
		100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
		100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5	Surat Perintah	
		100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
		100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
		100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
		100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
		100.3.7.1	Dalam Negeri
		100.3.7.2	Luar Negeri
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
		100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
		100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
		100.3.11.3	Tata Usaha Negara
		100.3.11.4	Perburuhan
		100.3.11.5	Arbitrase
		100.3.11.6	Sengketa Adat
	100.3.12	Perijinan	
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		100.3.13.1	Hak Cipta
		100.3.13.2	Hak Paten
		100.3.13.3	Hak Desain Industri
		100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
		100.3.13.5	Hak Merk
	100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	
200	POLITIK		
200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara

		200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
		200.1.2.3	Bela Negara
		200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
		200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
		200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
		200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
		200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
		200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
		200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
		200.1.4.1	Ketahanan Seni
		200.1.4.2	Ketahanan Budaya
		200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
		200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
		200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
		200.1.4.6	Fasilitasi
		200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
		200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
		200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
		200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
		200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
	200.1.5	Politik Dalam Negeri	
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah
		200.1.5.7	Database Parpol
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2 PEMILU			
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik

		200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
		200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
		200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
		200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
		200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
	200.2.5	Pencalonan Pemilu	
		200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
		200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
		200.2.5.3	Daftar bakal calon
		200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
		200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
		200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.6	Kampanye Pemilu	
		200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
		200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
		200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
	200.2.7	Dana Kampanye	
		200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
		200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
		200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
		200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
		200.2.8.2	Master surat suara
		200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
		200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
		200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
		200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
		200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
		200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	
		300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja
		300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat	
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	
300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN		

	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	
		300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
		300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
		300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
		300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
		300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
		300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan	
		300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
		300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
		300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	
	300.2.8	Operasi Komunikasi	
		300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
		300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
		300.2.8.3	Registrasi BEACON
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi	
		300.2.12.1	Laporan harian
		300.2.12.2	Laporan bulanan
		300.2.12.3	Laporan tahunan
		300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya	
		400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
		400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
		400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
		400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
		400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur

		400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
		400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
		400.1.4.1	Fasilitasi Investasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
		400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
		400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
		400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
		400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
		400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
		400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
		400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
		400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
		400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
		400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
		400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
		400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
		400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
		400.1.5.5	Ketenagakerjaan
		400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
		400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
		400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
		400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
		400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
		400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
		400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
		400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
		400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	
		400.2.2.1	Data gender
		400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	

		400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
		400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
		400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
		400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
		400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
		400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)	
		400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
		400.2.4.2	Data perlindungan anak
		400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
		400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
		400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
		400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
		400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
		400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
		400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	
400.3	PENDIDIKAN		
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	
		400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
		400.3.2.2	Pelatihan Sosial
		400.3.2.3	Peringatan Hari anak
		400.3.2.4	Block Grant
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
		400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
		400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
		400.3.3.3	Pembinaan Program
		400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
		400.3.3.5	Pameran
		400.3.3.6	Rakor
		400.3.3.7	Sosialisasi
		400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
		400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
		400.3.5.2	Block Grant
		400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
		400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
		400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
		400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
		400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran

		400.3.6.2	Block Grant
		400.3.6.3	Lomba, festival
		400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
		400.3.6.5	Pendataan
		400.3.6.6	Kelembagaan
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
		400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
		400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
		400.3.7.3	Sertifikasi Guru
		400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
		400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
		400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
		400.3.7.7	Block Grant
	400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
		400.3.8.1	Kurikulum
		400.3.8.2	Bahan Ajar
		400.3.8.3	Pelatihan
		400.3.8.4	Block grant
		400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
		400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
		400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
	400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
		400.3.9.1	Bahan ajar
		400.3.9.2	Petunjuk Teknis
		400.3.9.3	Block grant
		400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
		400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
		400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
		400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
		400.3.9.8	Pendataan
		400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
	400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
		400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
		400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
		400.3.10.3	Setifikasi Guru
		400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
		400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
		400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
		400.3.10.7	Block grant
		400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.11	Penilaian Pendidikan	
		400.3.11.1	Penilaian Akademik
		400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
		400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
	400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
		400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
		400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
	400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
		400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
		400.3.13.2	Sarana Pendidikan
		400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4	KEOLAHRAGAAN		
	400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	

	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	
		400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
		400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
		400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
		400.4.3.1	Olahraga Massal
		400.4.3.2	Olahraga Tradisional
		400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	
		400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
		400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
		400.4.4.3	Olahraga Prestasi
		400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
		400.4.5.1	Olahraga Tradisional
		400.4.5.2	Layanan Khusus
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
		400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
		400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
		400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
		400.4.7.2	Kompetisi
		400.4.7.3	IPTEK Olahraga
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
		400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
		400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
		400.4.9.1	Industri Olahraga
		400.4.9.2	Promosi Olahraga
	400.4.10	Olahraga Prestasi	
		400.4.10.1	Daerah
		400.4.10.2	Nasional
		400.4.10.3	Internasional
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
		400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
		400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
		400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5	KEPEMUDAAN		
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	
		400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
		400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
		400.5.2.3	Pengembangan
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda	
		400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
		400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
		400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda	
		400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
		400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
		400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	
		400.5.5.1	Pengkajian
		400.5.5.2	Pengembangan

		400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
		400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
		400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
	400.5.7	Kewirausahaan	
		400.5.7.1	Kelembagaan
		400.5.7.2	Pengaderan
		400.5.7.3	Perintisan
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
		400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
		400.5.9.1	Standardisasi
		400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
		400.5.10.1	Kemitraan
		400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6	KEBUDAYAAN		
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
		400.6.2.1	Registrasi Nasional
		400.6.2.2	Pelindungan
		400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
		400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
		400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
		400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
		400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
		400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
		400.6.4.1	Sejarah
		400.6.4.2	Pemetaan nilai
		400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
		400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
		400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
		400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
		400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
		400.6.5.2	Kekayaan budaya
		400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
		400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7	KESEHATAN		
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar	
		400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
		400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer

	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan	
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra

400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga

400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik

		400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
		400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
		400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
		400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
		400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
		400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
	400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.8.2	Fasilitasi	
		400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
		400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
		400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
		400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL		
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
		400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
		400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
		400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social
		400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
		400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
		400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
		400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
		400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
		400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
		400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga

		400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
		400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
		400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
		400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
		400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
		400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
		400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
		400.9.10.4	Kerjasama
	400.9.11	Jaminan Sosial	
		400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
		400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
		400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
		400.9.11.4	Kerjasama
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
		400.9.12.1	Ketahanan keluarga
		400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
		400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
		400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
		400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
		400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
		400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
		400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
		400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
		400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
		400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
		400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
		400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
		400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
		400.9.14.5	Bantuan Langsung
		400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
		400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
		400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
		400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan

		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
	400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
		400.10.4.1	Budaya Nusantara
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
		400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.11.2	Pertamanan	
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
		400.11.2.2	Taman Kota
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman	
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
		400.11.3.2	Pemakaman
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
	400.11.4	Jalur Hijau	
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
	400.11.7	Pengelolaan Data	
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk	
		400.12.2.1	Identitas Penduduk

		400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
		400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
		400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
		400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3	Pencatatan Sipil	
		400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
		400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
		400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
		400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
		400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
		400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
		400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
		400.12.5.2	Kualitas Penduduk
		400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
		400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
		400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan	
		400.12.6.1	Indikator Kependudukan
		400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
		400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
		400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
		400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.13	KELUARGA BERENCANA		
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
		400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
		400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
		400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
		400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	
		400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
		400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
		400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
		400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
		400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
		400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
	400.13.7	Pengembangan Sistem	
		400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
		400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.8	Pengembangan Materi	
		400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal

		400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
		400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
		400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.10	Analisis Sosial	
	400.13.11	Analisis Ekonomi	
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
	400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
		400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
		400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
		400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
		400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	
		400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
		400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
		400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
		400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria	
		400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
		400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
	400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	
	400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	
	400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak	
		400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
		400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
	400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	
		400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
		400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja	
		400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
		400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
	400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	
		400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja

	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	
400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	
400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	
	400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	
400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	
400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41	Advokasi dan pencitraan	
400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	400.13.42.1	Promosi
	400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
	400.13.42.3	Produk media komunikasi
400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	
400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

	400.13.46	Tenaga Lini Lapangan	
		400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
		400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
	400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan	
		400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
		400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
	400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan	
		400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
		400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	
		400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
		400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	
	400.13.51	Analisis dan evaluasi	
		400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
		400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data	
		400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
		400.13.52.2	Pengelolaan bank data
	400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi	
		400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
		400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	
		400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
		400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT		
	400.14.1	Keprotokolan	
		400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
		400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
		400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
		400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	
	400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	
	400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	
		400.14.4.1	Kliping koran
		400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
		400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	
		400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
		400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
		400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
		400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
		400.14.5.5	Forum Kehumasan
		400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	

	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
	400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
500	PEREKONOMIAN	
500.1	KETAHANAN PANGAN	
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2	Akses Pangan
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan
	500.1.3.1	Distribusi Pangan
	500.1.3.2	Harga Pangan
	500.1.3.3	Cadangan Pangan
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
	500.1.7	Bimbingan Teknis
	500.1.8	Evaluasi
500.2	PERDAGANGAN	
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha

		500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
		500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
		500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
		500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
		500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
		500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
		500.2.3.11	Jasa
		500.2.3.12	Kerjasama
		500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
		500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
		500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
		500.2.3.16	Pengawasan
		500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
		500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
		500.2.4.1	Pengkajian pasar
		500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
		500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
		500.2.4.4	Pengkajian pasar
		500.2.4.5	Pengembangan Pasar
		500.2.4.6	Sistem informasi
		500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
		500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
		500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
	500.2.5	Bimbingan Teknis	
	500.2.6	Evaluasi	
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
		500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
		500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
		500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
		500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi	
		500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
		500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
		500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
		500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4	Pembiayaan	
		500.3.4.1	Program Pendanaan
		500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
		500.3.4.3	Urusan Permodalan
		500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
		500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
		500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
		500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
		500.3.5.2	Ekspor dan Impor
		500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
		500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
		500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
		500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan

	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5.2	Perikanan Tangkap	
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya

		500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
		500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
		500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
		500.5.4.2	Pengembangan Produk
		500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		500.5.4.4	Industri Pengolahan
		500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
		500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
		500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
		500.5.4.8	Pengembangan Industri
		500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
		500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
		500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
		500.5.4.18	Pengembangan Impor
		500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.20	Pelayanan Usaha
		500.5.4.21	Kemitraan Usaha
		500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
		500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
		500.5.4.24	Informasi dan Promosi
	500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
		500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
		500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
		500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
		500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
		500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
		500.5.5.6	Konservasi Wawasan
		500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
		500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
		500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
		500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
		500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
		500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
		500.5.5.17	Akses Permodalan
		500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
		500.5.5.20	Pengembangan Usaha
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
		500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
		500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
		500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
		500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
		500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan

		500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
		500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
		500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
		500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
		500.5.6.12	Pengawasan Kapal Pengawas
		500.5.6.13	Sistem Pemantauan
		500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
		500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
		500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
		500.5.6.17	Penyidikan
		500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
		500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
		500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.7	Karantina Ikan	
		500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
		500.5.7.2	Penahanan
		500.5.7.3	Pengasingan
		500.5.7.4	Pengamatan
		500.5.7.5	Pengakuan
		500.5.7.6	Penolakan
		500.5.7.7	Pemusnahan
		500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
		500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
		500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
		500.5.7.11	Pemasukan Formulir
		500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
		500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
		500.5.7.14	Surat Perintah
		500.5.7.15	Rekomendasi
		500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
		500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
		500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
		500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
		500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN		
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.6.2	Perlindungan hortikultura	
		500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
		500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
		500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
		500.6.3.1	Penilaian Varietas
		500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
		500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
		500.6.4.1	Basis Data Lahan
		500.6.4.2	Pengendalian Lahan
		500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
		500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan

	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
	500.6.7	Pupuk Pestisida
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
	500.6.10	Budidaya Serealia
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
	500.6.12	Tanaman Pangan
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
	500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Hortikultura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
	500.6.15	Mutu dan Standarasi
	500.6.15.1	Standardisasi

		500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
		500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
		500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
	500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
		500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
		500.6.16.2	Investasi
		500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
		500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
	500.6.17	Pemasaran Domestik	
		500.6.17.1	Informasi Pasar
		500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
		500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
		500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
	500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	
	500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
		500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
		500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
	500.6.20	Diseminasi	
	500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
		500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demplot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
		500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
	500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
	500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
	500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
	500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		500.6.26.1	Hak Cipta
		500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
		500.6.26.3	Hak Paten Biasa
		500.6.26.4	Hak Merek
		500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
		500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
		500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
	500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
		500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
		500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
		500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
	500.6.28	Pelayanan Hukum	
		500.6.28.1	Sertifikasi
		500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
	500.6.29	Karantina Pertanian	
		500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
		500.6.29.2	Karantina Hewan
	500.6.30	Bimbingan Teknis	
	500.6.31	Evaluasi	
500.7	PETERNAKAN		

	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	
	500.7.2.2	Pakan Ternak	
	500.7.2.3	Budidaya Ternak	
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)	
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	
	500.7.3	Bimbingn Teknis	
	500.7.4	Evaluasi	
500.8	PERKEBUNAN		
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.8.2	Tanaman Semusim	
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.4	Tanaman Tahunan	
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan	
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan	
500.9	PERINDUSTRIAN		

	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	
		500.9.2.1	Industri Manufaktur
		500.9.2.2	Industri Agro
		500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.3	Promosi Industri	
		500.9.3.1	Industri Manufaktur
		500.9.3.2	Promosi Industri Agro
		500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
		500.9.4.1	Industri Manufaktur
		500.9.4.2	Industri Agro
		500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual	
		500.9.5.1	Industri Manufaktur
		500.9.5.2	Industri Agro
		500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.6	Industri Hijau	
		500.9.6.1	Industri Manufaktur
		500.9.6.2	Industri Agro
		500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
	500.9.12	Standarisasi	
		500.9.12.1	Standar
		500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
		500.9.12.3	Infrastruktur Standar
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
		500.9.13.1	Kebijakan Industri
		500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
		500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
		500.9.14.1	Industri Hijau
		500.9.14.2	Lingkungan Hidup
		500.9.14.3	Energi
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
		500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
		500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
		500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
		500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
		500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.2.3	Pertambangan
		500.10.2.4	Panas Bumi

		500.10.2.5	Geosains
		500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
		500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
	500.10.3	Penelitian Kegeologian	
		500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
		500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
		500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
		500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
		500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
		500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
		500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		500.10.3.9	Survei Geologi
	500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
		500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
		500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.4.4	Survei Geologi
		500.10.4.5	Konservasi
	500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
		500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
		500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
		500.10.5.4	Survei Geologi
	500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
		500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
		500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
		500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
		500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
		500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
		500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK)
			Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
		500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
		500.10.7.3	Eksplotasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplotasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
		500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
		500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
		500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
		500.10.7.7	Partisipasi Interest
		500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan

	500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta
			pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)
		500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
		500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
		500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
		500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)
		500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
		500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
		500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
		500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
		500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
		500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/
			Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)
		500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)
		500.10.9.10	Usaha penunjang
	500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
		500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
		500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
		500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
		500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
		500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
		500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
	500.10.12	Panas Bumi	
		500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
		500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)

		500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
		500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
		500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
		500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
		500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
		500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
		500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
		500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
		500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
		500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
		500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
		500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
		500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitas Bidang Panas Bumi
		500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
		500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
	500.10.14	Aneka Energi	
		500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
		500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
		500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
		500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.15	Konservasi Energi	
		500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
		500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
		500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
		500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
		500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
		500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
		500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
		500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
		500.10.15.9	Investment Grade Audit (IGA)
		500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
	500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
		500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
		500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
	500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
		500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)
		500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)
		500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan

	500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
		500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL- S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)
		500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
		500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
		500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
		500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
		500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
		500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
	500.10.20	Sertifikasi	
		500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
		500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
		500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
		500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
		500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
	500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
	500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
	500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
		500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
		500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
		500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
		500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
		500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
		500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
	500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
		500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
		500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
		500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
		500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
		500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
		500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah
			Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
		500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
		500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara

	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	

		500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
		500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
		500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
		500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)
		500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
		500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
		500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
		500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)
		500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)
		500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)
		500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
		500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
		500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
		500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)
		500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)
		500.10.29.17	Pengawasan Teknis
		500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
		500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)
	500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
		500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
		500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
		500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/ pengembangan/inovasi
		500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
		500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

		500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
		500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
	500.10.31	Sarana Litbang	
		500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
		500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
	500.10.32	Afiliasi	
		500.10.32.1	Proyek Percontohan
		500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
		500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
		500.10.32.4	Penyajian Informasi
	500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
		500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
		500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
		500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
		500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
	500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
		500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
		500.10.34.3	Laboratorium
		500.10.34.4	Study
		500.10.34.5	Teknologi Proses
		500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
		500.10.34.7	Teknologi Gas
	500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
		500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
		500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
		500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
	500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
		500.10.36.1	Energi baru terbarukan
		500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
		500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
		500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
500.11	PERHUBUNGAN		
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
		500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penumpang
		500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
		500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
		500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
		500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
		500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
		500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
		500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal

		500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
		500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
		500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
		500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
		500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
		500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
		500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
		500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
		500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
		500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
		500.11.5.4	Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
		500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
		500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
	500.11.7	Perlengkapan Jalan	
		500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
		500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
		500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
		500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
		500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
	500.11.8	Angkutan Penumpang	
		500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
		500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
		500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
		500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
		500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
		500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
		500.11.8.7	Angkutan perintis
		500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
	500.11.9	Angkutan Barang	
		500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
		500.11.9.2	Tarif angkutan barang
		500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
		500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
		500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
	500.11.10	Monitoring Operasional	
		500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
		500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
	500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		500.11.11.1	Pedoman Teknis
		500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		500.11.11.3	Bimtek PPNS
		500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

	500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
		500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
	500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
		500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
		500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
	500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
		500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
	500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
		500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
		500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
	500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
		500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
		500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
		500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
	500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	

		500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
		500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
		500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
		500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
		500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
	500.11.24	Angkutan Perkotaan	
		500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
		500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
		500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
		500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
		500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
		500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
		500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
		500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
		500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
		500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
	500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
		500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
		500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
		500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
		500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
		500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
	500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
		500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

		500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
		500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
		500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
	500.11.31	Audit Keselamatan	
		500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
		500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
		500.11.32.1	Pedoman keselamatan
		500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.33	Parkir	
		500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
		500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
		500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.12.2	Telekomunikasi	
		500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
		500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
		500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
		500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3	Penyiaran	
		500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
		500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
		500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
		500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
		500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
		500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
		500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
	500.12.5	Pengendalian Informatika	
		500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
		500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
		500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
		500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
	500.12.6	e- Government	
		500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
		500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
		500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government
		500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
		500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
	500.12.7	e- Business	
		500.12.7.1	Tata Kelola e-Business

		500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
		500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business
		500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
		500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
		500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
		500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
		500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
		500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
		500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
	500.12.10	Keamanan Informasi	
		500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
		500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
		500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
		500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
		500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
	500.12.11	Komunikasi Publik	
		500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
		500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
		500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
	500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
		500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
		500.12.12.2	Informasi Perekonomian
		500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
	500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
		500.12.13.1	Media Cetak
		500.12.13.2	Media Online
		500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
	500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
		500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
		500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
		500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
	500.12.15	Infrastruktur Informatika	
		500.12.15.1	Jaringan
		500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
		500.12.15.3	Keamanan Informatika
	500.12.16	Sistem dan Data	
		500.12.16.1	Portal dan Konten
		500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
		500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
	500.12.17	Pusat Kerjasama	
		500.12.17.1	Kerja Sama daerah
		500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
	500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
		500.12.18.1	Pelayanan Informasi
		500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
		500.12.18.3	Bimbingan Teknis
	500.12.19	Evaluasi	
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
		500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
		500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata

		500.13.2.3	Industri Pariwisata
		500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
		500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
		500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
		500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
		500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
		500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
		500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	
		500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
		500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
		500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK		
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	
		500.14.2.1	Perencanaan
		500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
		500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
		500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
		500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
		500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
	500.14.3	Survei	
		500.14.3.1	Perencanaan
		500.14.3.2	Persiapan
		500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)
		500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)

		500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
		500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
	500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
		500.14.4.1	Kompilasi Data
		500.14.4.2	Analisis data
		500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
500.15	KETENAGAKERJAAN		
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
		500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
		500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
		500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
		500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
		500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
		500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
		500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
		500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga
			Pelatihan
		500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
		500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
		500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
		500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
		500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
		500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
	500.15.6	Bina Pemagangan	
		500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
		500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
		500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
		500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
		500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
		500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
		500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
		500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
		500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
		500.15.8.3	Bursa Kerja
		500.15.8.4	Analisis Jabatan
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		500.15.9.1	Antar Kerja
		500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
		500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja	
	Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

		500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
	500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
		500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
		500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
		500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
		500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
	500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
		500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16	PENANAMAN MODAL		
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal	
		500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
		500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
		500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
		500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
		500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
		500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
		500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
		500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
		500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
		500.16.4.1	Pengembangan Promosi
		500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
		500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
		500.16.4.4	Promosi Sektoral
		500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
		500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
		500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
		500.16.5.2	Kerja Sama Regional
		500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
		500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
		500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
		500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
		500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
		500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
		500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
		500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
		500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
		500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
		500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
500.17	PERTANAHAN		
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	
		500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
		500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
		500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
		500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
		500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
		500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
		500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
	500.17.4	Sengketa Tanah	
		500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
		500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian
500.18	TRANSMIGRASI		
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
		500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
		500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
		500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
		500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
		500.18.3.1	Penyiapan Lahan
		500.18.3.2	Penyiapan Sarana
		500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
		500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
	500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
		500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
		500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
		500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
		500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
		500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
		500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
		500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
		500.18.5.4	Pelayanan Investasi
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
		500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
		500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
		500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
		500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
		500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
	500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
		500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
		500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya

		500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
		500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
	500.18.8	Pengembangan Usaha	
		500.18.8.1	Kewirausahaan
		500.18.8.2	Produksi
		500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
		500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
		500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
		500.18.9.2	Pengembangan Sarana
		500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
		500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
		500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
		500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
		500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
		500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN		
600.1	PEKERJAAN UMUM		
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air	
		600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
		600.1.2.2	Kelembagaan
		600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
		600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
		600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
		600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
		600.1.3.2	Manajemen Mutu
		600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
		600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
		600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
		600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
		600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
		600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
		600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
		600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
		600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
		600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
		600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
		600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
	600.1.8	Pembangunan Jalan	
		600.1.8.1	Standar dan Pedoman
		600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
		600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
		600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
	600.1.9	Preservasi Jalan	

	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman	
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	
600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan

	600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2	Analisa Teknik
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas

	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
		600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
		600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
		600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
		600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
		600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
		600.2.15.2	Pengembangan Materi
		600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
		600.2.16.1	Antar Sektor
		600.2.16.2	Antar Wilayah
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
		600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
		600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
		600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
		600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
		600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
		600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
		600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)		
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	
	600.3.2	Perencanaan	
		600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
		600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
		600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
		600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
		600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
		600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
		600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
		600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
		600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.4	Pemetaan	
		600.3.4.1	Peta Dasar
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
		600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
		600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	LINGKUNGAN HIDUP		
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	
		Hidup	

		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
		600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
	600.4.5	Dampak Lingkungan	
		600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
		600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
		600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
		600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
		600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
		600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
		600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
		600.4.8.1	Pengembangan
		600.4.8.2	Pemanfaatan
		600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
		600.4.8.4	Keamanan Hayati
		600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
		600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
		600.4.9.2	Rawa
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
		600.4.10.1	Perangkat mitigasi
		600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
		600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
		600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
		600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
		600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
	600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
		600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
		600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
		600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
		600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
		600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
		600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
	600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
		600.4.14.1	Pemantauan
		600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
	600.4.15	Pengelolaan Sampah	
		600.4.15.1	Pembatasan sampah
		600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
		600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura

		600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
		600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
		600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
		600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
		600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
	600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
		600.4.18.1	Penyidikan
		600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
		600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
		600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
		600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
		600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
		600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
		600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
		600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
		600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
		600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
		600.4.23.1	Pengelolaan Data
		600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
		600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
		600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan	
		600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
		600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
		600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
		600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
		600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
		600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lngkungan
		600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN		
700.1	PENGAWASAN INTERNAL		
	700.1.1	Rencana Pengawasan	
		700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
		700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
		700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
		700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
		700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
		700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
		700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

		700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
		700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
		700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
		700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
		700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
		700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
		700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN		
800.1	SUMBER DAYA MANUSIA		
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
		800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
		800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
		800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
		800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
		800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)
		800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)
		800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
		800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
		800.1.2.5	Pengangkatan ASN
		800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
		800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
		800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
	800.1.3	Mutasi Pegawai	
		800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara,
		800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
		800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
		800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
		800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
		800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
	800.1.4	Pengembangan Karir	
		800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
		800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
		800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
		800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)

	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
		800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
		800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
		800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
		800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
		800.1.6.2	Disiplin
		800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
		800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
		800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
		800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)
	800.1.7	Bantuan Hukum	
	800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
			1.Status Kepegawaian
			2.Kedudukan Kepegawaian
			3.Keberatan Pegawai
			4.Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
	800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
		800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
		800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
		800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
		800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
	800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
		800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
		800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
		800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
		800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
		800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
		800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
	800.1.11	Administrasi Pegawai	
		800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
		800.1.11.2	Cuti Sakit
		800.1.11.3	Cuti Bersalin
		800.1.11.4	Cuti Tahunan
		800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
		800.1.11.6	Cuti Besar
		800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
		800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
		800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
		800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
		800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
		800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
		800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
		800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
		800.1.12.3	Tabungan Perumahan
		800.1.12.4	Bantuan Sosial
		800.1.12.5	Pakaian Dinas
		800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
		800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih

		800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
		800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
		800.1.12.10	Rekam Medis
	800.1.13	Administrasi Perseorangan	
		800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
		800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
		800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
		800.1.13.4	Sekretaris Daerah
		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14	Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
		800.2.2.4	Modul-modul diklat
		800.2.2.5	Panduan fasilitator
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3	Widyaiswara	
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN		
900.1	KEUANGAN DAERAH		
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)	
		900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
		900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
		900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan

			Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
		900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
	900.1.2	Penyusunan Anggaran	
		900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
		900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
		900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
		900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
		900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
		900.1.3.2	Pendapatan
		900.1.3.3	Belanja
		900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
		900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
		900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
		900.1.3.7	Daftar Gaji
		900.1.3.8	Kartu Gaji
		900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
		900.1.3.10	Laporan Keuangan
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
		900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
		900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
		900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
		900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)
		900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
		900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
		900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
		900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
		900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
		900.1.4.10	Staff Appraisal Report
		900.1.4.11	Report /Laporan
		900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
		900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
		900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
		900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
		900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
		900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
		900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran

	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
		900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan
			Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
		900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
		900.1.7.3	Buku Rekening Bank
		900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
		900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
		900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
		900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPSS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan	
		Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
		900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
		900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
		900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
		900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
		900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
		900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
		900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
		900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
	900.1.12	Anggaran Daerah	
		900.1.12.1	Anggaran Daerah
		900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
		900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain:

			Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
		900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
		900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
		900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)
		900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi
			pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
		900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)
		900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)
		900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
		900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
		900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
	900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
		900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
		900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
		900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)

		900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
		900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)

Wates, 12 Oktober 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI